



ANALISIS FILM "SIAPA DIATAS PRESIDEN": REALITAS PRAKTIK OLIGARKI DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA

Farah Syafirna^{1*}, Rizqi Auliaur Rohmah², Bakti Fatwa Anbiya³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 26, 2024

Revised June 04, 2024

Accepted June 10, 2024

Kata Kunci:

Oligarki; Demokrasi; Indonesia

Keywords:

Oligarchy; Democracy; Indonesia



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by PT Citra Media Publishing.

ABSTRAK

Film "Siapa Diatas Presiden" merupakan sebuah kajian yang bertujuan untuk menggali realitas praktik oligarki dalam sistem demokrasi di Indonesia. Film tersebut menjadi objek penelitian karena mampu memvisualisasikan dinamika kekuasaan politik dan interaksi antara elit politik dalam konteks demokrasi Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan analisis film dan teori oligarki, penelitian ini menyoroti berbagai elemen naratif dan visual dalam film yang mengungkap pola dominasi politik oleh sejumlah kelompok oligarki. Hasil analisis menunjukkan bahwa film tersebut memperlihatkan bagaimana oligarki memanipulasi proses politik dan mengendalikan kekuasaan, seringkali dengan memanfaatkan institusi demokrasi untuk

kepentingan pribadi atau kelompok. Implikasi temuan ini menyiratkan pentingnya meningkatkan kesadaran publik akan dinamika politik dan oligarki dalam sistem demokrasi, serta perlunya reformasi dalam memperkuat prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi politik yang sebenarnya.

ABSTRACT

The film "Who is Above the President" is a study that aims to explore the reality of oligarchic practices in the democratic system in Indonesia. The film became an object of research because it was able to visualize the dynamics of political power and interactions between political elites in the context of Indonesian democracy. By using a film analysis approach and oligarchy theory, this research highlights various narrative and visual elements in films that reveal patterns of political domination by a number of oligarchic groups. The results of the analysis show that the film shows how oligarchs manipulate the political process and control power, often by exploiting democratic institutions for personal or group interests. The implications of these findings imply the importance of increasing public awareness of the dynamics of politics and oligarchy in democratic systems, as well as the need for reforms to strengthen the principles of accountability, transparency and true political participation

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dalam kehidupan bermasyarakat mengalami perubahan yang cenderung pesat. Kebutuhan masyarakat akan informasi yang semakin meningkat tersebut disebabkan oleh globalisasi. Oleh karena itu guna menghadapi globalisasi, perubahan terbaru dalam teknologi dan media, masyarakat membutuhkan pengembangan literasi media kritis. Agar masyarakat dapat menjadi peserta aktif dalam demokrasi, serta dapat secara akurat membaca pesan media dan

*Corresponding author

E-mail addresses: farahsyafirna92@gmail.com

menghasilkan produk media (Li, 2018). Salah satu bentuk media informasi yang mengalami perkembangan pesat di Indonesia adalah film. Kualitas film Indonesia terus bergerak membaik, ditandai dengan kehadiran mereka di festival-festival film bergengsi (Arifianto, 2018).

Salah satu film drama yang cukup menarik di Indonesia yang rilis pada Februari 2015 lalu adalah "2014: Siapa di Atas Presiden?" karya Rahabi Mandra dan Hanung Bramantyo. Film dengan penggambaran suasana politik di Indonesia ketika masa pemilihan ini dibungkus dengan retorika-retorika yang ada pada realitasnya. Disisipi dengan dialog-dialog yang mendalam, menjadikan film ini tak hanya sebagai film hiburan tetapi banyak merepresentasi keadaan politik di Indonesia (Fitransyah And Aswan A., 2024). Film ini menarik untuk diteliti karena mengangkat tentang representasi yang terjadi di perpolitikan dan pemerintahan di Indonesia. Ada relevansi antara kejadian di masyarakat dengan film ini, terutama tentang kehidupan politik oligarki dan demokrasi.

Realitas praktik oligarki dalam sistem demokrasi di Indonesia merupakan fenomena yang semakin mendapatkan perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. Demokrasi, yang sejatinya bertujuan untuk memberikan suara kepada seluruh rakyat, sering kali terdistorsi oleh kekuatan oligarki yang mendominasi. Oligarki, yang merujuk pada segelintir elite yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik, sering kali mampu mengarahkan kebijakan dan keputusan politik sesuai dengan kepentingan mereka, mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi yang sejati (Suharsimi, 2017). Media massa juga tidak luput dari pengaruh oligarki. Banyak media besar di Indonesia dimiliki oleh para oligark yang memiliki afiliasi politik. Hal ini menyebabkan berita dan informasi yang disampaikan kepada publik sering kali bias, dengan agenda tersembunyi untuk mendukung kepentingan pemilik media. Kebebasan pers yang seharusnya menjadi pilar demokrasi pun terancam oleh kepentingan ekonomi dan politik dari segelintir elite (Hasan, 2013).

Oligarki di Indonesia telah menunjukkan dirinya dalam berbagai praktik yang meliputi penetrasi politik, intervensi dalam pembuatan kebijakan publik, dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi yang signifikan. Dalam konteks politik, oligarki sering kali memanfaatkan koneksinya dengan partai politik untuk memperoleh kendali atas proses politik, menggiring kepentingan nasional untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri (Mugiyanto, 2022). Legislasi dan regulasi juga sering kali terpengaruh oleh kepentingan oligarki. Banyak undang-undang dan peraturan yang dibuat cenderung menguntungkan para pengusaha besar, seperti dalam sektor pertambangan, perkebunan, dan properti. Lobi-lobi kuat dari kelompok kepentingan ekonomi ini mampu mempengaruhi proses legislasi, sering kali dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak dan lingkungan (Muhadam & Teguh, 2015). Dampak dari praktik oligarki ini sangatlah meresahkan, terutama terhadap kesehatan demokrasi di Indonesia. Demokrasi, yang seharusnya menjadi landasan bagi keadilan, partisipasi rakyat, dan akuntabilitas pemerintah, terkadang dikekang oleh kepentingan sempit dari segelintir kelompok oligarki. Hal ini mengarah pada terdistorsinya mekanisme demokrasi, di mana suara mayoritas seringkali terpinggirkan oleh kekuatan finansial dan politik dari oligarki (Fitri Kumala et al., 2021).

Namun, tidak semua harapan hilang. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi praktik oligarki dan memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia. Langkah-langkah seperti reformasi politik, penguatan lembaga-lembaga pengawas dan pemberantas korupsi, serta pemberdayaan masyarakat sipil menjadi beberapa contoh strategi yang telah ditempuh untuk meredam pengaruh oligarki dan memperjuangkan ruang yang lebih luas bagi partisipasi politik yang inklusif dan berkeadilan (Sunardi, 2020). Dalam kerangka ini, penting untuk menyelidiki lebih lanjut tentang peran oligarki dalam dinamika politik Indonesia, dampaknya terhadap demokrasi, dan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pengaruh mereka. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas fenomena ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam memperjuangkan sistem politik yang lebih transparan, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan semiotik untuk mengkaji film sebagai objek penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap makna-makna simbolik dan pesan-pesan implisit yang terkandung dalam film. Proses penelitian dimulai dengan pemilihan film yang relevan sebagai studi kasus, diikuti dengan penentuan kriteria analisis yang mencakup elemen-elemen visual dan naratif, seperti sinematografi, penokohan, dialog, alur cerita, dan penggunaan warna serta musik. Data dikumpulkan melalui pengamatan mendalam dan pencatatan sistematis terhadap setiap adegan yang memiliki potensi signifikan untuk dianalisis.

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tanda-tanda dan kode-kode semiotik yang ada dalam film, kemudian menafsirkannya berdasarkan teori semiotik. Proses interpretasi ini melibatkan dekomposisi elemen-elemen film ke dalam unit-unit makna yang lebih kecil dan menghubungkannya dengan konteks sosial yang lebih luas. Penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana film tersebut berkomunikasi dengan audiens, bagaimana narasi dan simbol-simbol visual dikonstruksi untuk menyampaikan pesan tertentu, dan bagaimana elemen-elemen tersebut mencerminkan atau mengkritisi realitas sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis

Peneliti melakukan analisis terhadap 6 adegan atau scene dalam film *Siapa Di Atas Presiden*, peneliti menganalisis setiap adegan yang dipilih secara detail, peneliti melihat adanya praktik oligarki yang di representasikan oleh tokoh-tokoh pada adegan-adegan yang telah dipilih dalam film *Siapa Di atas Presiden*.

Tabel 1. Adegan Atau Scane Dalam Film *Siapa Di Atas Presiden*

NO	VISUAL	ADEGAN
----	--------	--------

1.



Dalam adegan ini awal mula terjadinya fitnah yang di buat oleh sekelompok orang berpengaruh, yang bertujuan untuk melengserkan salah satu calon presiden (Bagas Notolegowo) yang dianggap ideal bagi rakyat untuk memimpin negara Indonesia.

Calon Presiden (Bagas Notolegowo) tersebut difitnah membunuh seseorang, untuk menghancurkan citranya dimata rakyat.

2.



Dalam adegan ini salah satu polwan bertanya kemana perginya bukti-bukti yang telah didapatkan.

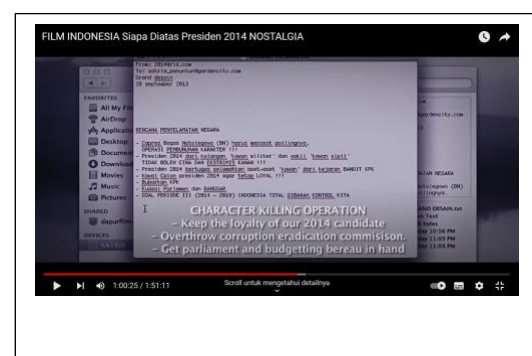
Selain memfitnah ternyata sekelompok orang berpengaruh ini bekerja sama dengan petinggi polisi untuk menyembunyikan bukti-bukti yang ada, dan jika ada yang berani menanyakan bukti-bukti maka akan dicopot jabatannya.

3.



Dalam adegan ini rakyat bersikeras membela calon presiden (Bagas Notolegowo) yang dijebloskan ke penjara karena memiliki kriteria yang sesuai menjadi negarawan, dan ideal menjadi pemimpin negara.

4.



Dalam adegan ini dipaparkan perintah-perintah dari sekelompok orang berpengaruh untuk menggagalkan calon presiden (Bagas Notolegowo) yang difitnah dan mensukseskan calon presiden yang berada dibawah naungannya, calon presiden yang berada dibawah kontrol sekelompok orang berpengaruh tersebut.

5.



Dalam adegan ini anak calon presiden terfitnah dan pengacaranya menyadari adanya dalang dibalik kasus fitnah ayahnya.

Tetapi bukan presiden yang menjadi dalangnya, tetapi siapa lagi yang mampu berpengaruh tinggi selain presiden.

6.



Dalam adegan ini munculah dalang dibalik kecurangan yang terjadi, dan sekelompok orang inilah yang memiliki kekuasaan di atas presiden, sehingga mampu bertindak apapun dibawah kendalinya. Kerabat dan orang terdekat pun bisa berkuasa asal dibawah kendalinya. Dari adegan ini sudah terlihat dengan jelas adanya unsur nepotisme dalam praktik oligarki.

Diskusi

Oligarki dan Praktiknya

Film "Siapa di Atas Presiden" adalah salah satu karya yang menggambarkan dinamika politik dan kekuasaan di Indonesia. Untuk menganalisis oligarki yang terkandung dalam film ini, kita perlu memahami bagaimana film tersebut menggambarkan struktur dan distribusi kekuasaan di kalangan elite politik dan ekonomi. Oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan atau kekuasaan yang dikendalikan oleh segelintir orang atau kelompok yang memiliki kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh yang besar (Ismayani et al., 2022). Di Indonesia, aktivitas oligarki telah menjadi fenomena yang cukup penting dalam dunia politik dan ekonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oligarki adalah pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang berkuasa yang berasal dari golongan atau golongan tertentu. Oligarki di Indonesia merupakan fenomena yang mengakar kuat dalam struktur politik dan ekonomi negara. Kekuasaan yang terkonsentrasi di tangan sekelompok kecil individu atau kelompok telah menciptakan ketimpangan akses terhadap kekayaan dan kekuasaan dalam masyarakat (Widjaja, 2022).

Representasi Kekuasaan dalam film "Siapa di Atas Presiden," terlihat jelas bahwa ada sekelompok elite yang memiliki pengaruh besar terhadap jalannya pemerintahan dan proses politik. Mereka digambarkan sebagai individu atau kelompok dengan akses langsung ke presiden dan pejabat tinggi lainnya, serta kemampuan untuk mempengaruhi keputusan politik yang signifikan. Para oligarki ini sering kali memiliki hubungan dekat antara bisnis dan politik, sehingga memungkinkan mereka menggunakan kekayaan dan pengaruh politik mereka untuk melindungi dan memperluas kepentingan bisnis mereka. Akibatnya, ketimpangan ekonomi dan sosial

semakin meningkat di Indonesia, dimana kelompok oligarki mendominasi sebagian besar sumber daya ekonomi sementara mayoritas penduduk terpinggirkan (Koho, 2021). Konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan segelintir orang membatasi akses mayoritas terhadap kesempatan yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik (Rijal, Muhammad Hasan Saeful dan Wawan Ichwanuddin, 2015).

Oligarki telah menjadi bagian integral dari lanskap politik dan sosial Indonesia, dan film "Siapa di Atas Presiden" menunjukkan betapa kompleksnya fenomena ini, melalui karakter-karakternya. Pengaruh terhadap kebijakan publik, film ini juga memperlihatkan bagaimana kebijakan publik sering kali dibuat untuk menguntungkan kelompok elite tersebut. Kebijakan yang seharusnya dirancang untuk kepentingan umum justru diubah atau dimodifikasi untuk memenuhi kepentingan oligarki, yang menunjukkan adanya distorsi dalam proses pembuatan kebijakan akibat pengaruh dari kelompok kecil yang berkuasa.

Selain itu, oligarki cenderung menciptakan lingkungan demokrasi yang tidak sehat dengan mengontrol media, mengganggu kebebasan berpendapat, dan memanipulasi proses politik untuk mempertahankan kekuasaan. Terdapat didalam film "Siapa di Atas Presiden" hukum juga dapat dimanipulasi oleh tokoh oligarki, terdapat adegan dimana bukti-bukti kebenaran sengaja tidak di tunjukan untuk di selidiki. Melihat lebih dekat aktivitas oligarki yang tergambar dalam film ini membuat kita memahami pentingnya memperkuat institusi demokrasi dan memperjuangkan prinsip keadilan sosial. Upaya untuk mengurangi kesenjangan dan mendorong proses politik yang lebih transparan dan akuntabel harus dilakukan melalui kerja sama masyarakat sipil, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, melalui kesadaran dan tindakan kolektif, masyarakat Indonesia dapat berupaya menuju sistem yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh warga negara (Fathurokhmah, 2021).

Pemisahan Kelas, film ini menunjukkan bagaimana kelas sosial di Indonesia sangat dipengaruhi oleh oligarki. Kelas elite, yang terdiri dari politisi, pengusaha, dan pejabat tinggi, memiliki akses eksklusif terhadap sumber daya dan peluang. Sementara itu, kelas bawah sering kali terpinggirkan dan tidak memiliki suara dalam proses politik. Dalam adegan ketiga dalam tabel diatas dijelaskan bahwa rakyat meminta keadilan dan mempertahankan calon presiden yang nemiliki kriteria ideal sebagai pemimpin, tetapi usaha mereka gagal karena mereka tidak memiliki wewenang dan kekuasaan, kelas bawah tidak memiliki hak apapun dalam berpolitik. Mereka hanya dimanipulasi oleh golongan atas yang tidak bertanggung jawab. Ini menciptakan ketidaksetaraan yang mendalam dalam masyarakat.

Aspek korupsi dan nepotisme adalah elemen penting dalam oligarki yang ditampilkan dalam film. Praktik-praktik ini memperkuat kekuasaan kelompok elite dengan memastikan bahwa hanya mereka dan jaringan mereka yang mendapat keuntungan dari sumber daya dan kesempatan yang ada. Film ini menunjukkan bagaimana korupsi dan nepotisme merusak sistem pemerintahan yang seharusnya adil dan transparan. Nepotisme, di mana anggota keluarga atau rekan dekat oligarki diberi posisi keuntungan dan peluang ekonomi yang tidak proporsional (Burhanuddin, 2020). Hal ini memperburuk ketidakadilan sosial dan menimbulkan rasa ketidakpuasan sosial. Selain itu, meningkatnya ketergantungan pada elit politik dan ekonomi juga menyebabkan ketidakstabilan politik, karena kepentingan dan

keputusan kelompok-kelompok kecil ini tidak selalu selaras dengan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat (Putri, 2021).

Dalam film "Siapa Diatas Presiden", kaum oligarkilah yang menggunakan asetnya untuk melakukan fitnah dan penipuan agar calon presiden tidak mempunyai kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan oligarki. Kelompok-kelompok ini berusaha mencapai puncak kekuasaan melalui berbagai cara untuk melipatgandakan kekayaan dan kekuasaannya. Inilah sebabnya pada akhirnya hak milik masyarakat kecil diabaikan.

Dari beberapa penjelasan diatas, demokrasi sebagai sistem pemerintahan dimana kekuasaan politik seharusnya dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat. Dalam demokrasi, keputusan-keputusan politik dibuat berdasarkan kehendak mayoritas, sambil tetap memperhatikan hak-hak minoritas dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, demokrasi mencakup prinsip-prinsip seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, hak untuk memilih dan dipilih, serta pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan bahwa kepentingan masyarakat secara keseluruhan diwakili dalam proses pengambilan keputusan (Anbiya, 2023).

Dalam adegan terakhir dalam film "Siapa Diatas Presiden" Bagas Notolegowo dinyatakan bebas dan berhasil terpilih menjadi presiden Indonesia periode 2014-2015, dengan pidato kemenangannya "Indonesiaku, Nusantaraku. Pemilu tahun ini mengingatkan saya pada pemilihan pemimpin di tahun lalu. Mereka bertarung, berjuang, bertekad untuk satu kemenangan, kemerdekaan Indonesia. Apakah pemimpin-pemimpin kita saat ini memiliki tujuan yang sama? Jawabannya ada didalam lubuk hati saudara-saudara sekalian. Tidak ada lagi sandiwara. Rakyat bukan penonton. Rakyat adalah raja. Pemerintah adalah pelayan. Saya adalah pelayan ". Demokrasi haruslah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam konteks ini, demokrasi tanpa demokrasi tentu merupakan sesuatu anomali, bahkan kontradiksi, karena kita tahu bahwa kekuasaan tertinggi harus ada di tangan rakyat dan tidak boleh diserahkan kepada pegawai negeri atau politisi taipan politik (Juniar, 2021).

Jika hal ini dibiarkan dalam waktu lama, maka akan mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia. Kehadiran partai politik di suatu negara merupakan alat penting dalam menjaga demokrasi. Tentu saja, ketika sebuah partai terkesan menganut sistem oligarki, maka suara rakyat akan dibungkam. Elit oligarki membutuhkan rakyat untuk mendapatkan suara atau dukungan sehingga mereka akan menyerukan agar suara rakyat didengar, hal ini sangat penting namun hanya didengarkan setiap 5 tahun sekali, khususnya pada pemilu atau pilkada.

Sistem oligarki ini memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan negara yang terlibat. Berikut dampak pemerintahan oligarki:

1. Hilangnya partisipasi warga negara Jika suatu negara melakukan percobaan atau menganut sistem pemerintahan oligarki, hal pertama yang akan terjadi adalah munculnya ancaman terhadap partisipasi warga negara. Situasi ini mungkin saja terjadi dan oleh karena itu proses politik yang berjalan akan disebabkan oleh pengaruh kaum oligarki dalam proses politik negara yang sepenuhnya

dikendalikan oleh kelompok penguasa. Dengan demikian, rakyat kecil kehilangan haknya untuk berpartisipasi sebagai warga negara.

2. Ancaman Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Ancaman atau dampak pemerintahan oligarki selanjutnya adalah terganggunya kesejahteraan masyarakat di masa depan. Situasi ini bisa terjadi akibat campur tangan orang-orang berkuasa yang ingin menjaga kekayaan (Yusri, Y., & Mahuli, 2023).

SIMPULAN DAN SARAN

Film "Siapa di Atas Presiden" menggambarkan dinamika politik dan kekuasaan di Indonesia dengan menyoroti fenomena oligarki, di mana kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir elite politik dan ekonomi yang memiliki pengaruh besar terhadap pemerintahan dan kebijakan publik. Oligarki di Indonesia menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi, di mana sumber daya dan kesempatan lebih banyak dinikmati oleh kelompok kecil tersebut, sementara mayoritas penduduk terpinggirkan. Dalam film ini, elite digambarkan memiliki akses langsung ke presiden dan pejabat tinggi lainnya, serta mampu mempengaruhi keputusan politik yang penting untuk melindungi dan memperluas kepentingan bisnis mereka. Ketimpangan ini diperparah oleh korupsi dan nepotisme, yang memperkuat kekuasaan kelompok elite dengan memastikan hanya mereka dan jaringan mereka yang mendapat keuntungan dari sumber daya yang ada.

Film ini juga menyoroti dampak negatif oligarki terhadap demokrasi, termasuk kontrol terhadap media, gangguan kebebasan berpendapat, dan manipulasi proses politik. Contoh konkret ditunjukkan melalui adegan di mana bukti kebenaran sengaja disembunyikan. Hal ini menciptakan demokrasi yang tidak sehat dan menimbulkan rasa ketidakpuasan sosial serta ketidakstabilan politik. Film "Siapa di Atas Presiden" menggambarkan bagaimana oligarki menghambat tercapainya keadilan sosial dan demokrasi yang sehat di Indonesia. Film ini menekankan pentingnya memperkuat institusi demokrasi dan memperjuangkan prinsip keadilan sosial melalui kerja sama masyarakat sipil, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, agar tercipta sistem yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh warga negara.

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti lebih banyak realitas praktik oligarki di Indonesia, sehingga dapat membuka pandangan masyarakat Indonesia mengenai praktik oligarki dan dapat menghindari para pemimpin yang menggunakan jalur apapun demi kekuasaan semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Anbiya, F. . (2023). *PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Menuju Masyarakat Kewarganegaraan Dalam Paradigma Unity of sciences*. PT.Nas Media Indonesia.
- Arifianto, D. T. (2018). Krisis dan Paradoks Film Indonesia Author: GARIN nuGroho And dynA herlinA. *International Journal of Creative and Arts Studies*. <https://doi.org/10.24821/ijcas.v4i1.2079>
- Burhanuddin, B. (2020). SIKAP NEPOTISME. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v6i2.175>
- Fathurokhmah, F. (2021). Lanskap Dinamika Kekuasaan Industri Media Di Indonesia: Perspektif Politik Dan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10.
- Fitri Kumala, Rahmayuni, R., Ariska, F., & Dinata, S. (2021). OLIGARKI DALAM

- DEMOKSARI INDONESIA MEMBUAT HUKUM SULIT DI TEGAKKAN. *Jurnal Syntax Fusion*. <https://doi.org/10.54543/fusion.v1i2.15>
- Fitransyah, & Aswan Aswan. (2024). THE TRADITION OF PUBLIC CRITISM IN THE LAPOR PAK PROGRAM (Analysis of the Spiral of Silence Jokes of Comedian Criticism). *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education*, 1(2), 93–119. <https://journal.discourseonline.id/index.php/djosse/article/view/105>
- Hasan, K. (2013). EKONOMI POLITIK MEDIA DAN KONVERGENSI MEDIA (MENUJU PUBLIK YANG KRITIS). *Seminar Nasional Ekonomi 2013 "Membangun Ekonomi Negeri Dari Daerah."*
- Ismayani, I., Yusri, Y., & Sianturi, P. (2022). Analisis Pengaruh Oligarki Terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v2i2.269>
- Juniar, A. (2021). Redesain Demokrasi Internal Partai Politik: Upaya Mencegah Oligarki dan Korupsi Partai Politik. *Jurnal Politikom Indonesiana*. <https://doi.org/10.35706/jpi.v6i1.4796>
- Koho, I. R. (2021). Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia. *Lensa*. <https://doi.org/10.58872/lensa.v15i1.6>
- Li, D. (2018). Critical media literacy: a social semiotic analysis and multimodal discourse of corporocracy. *International Journal of Education and the Arts*.
- Mugiyanto, M. (2022). Hubungan Oligarki Kekuasaan Dengan Politik Hukum Penguasa. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.54>
- Muhadam, L., & Teguh, I. (2015). PARTAI POLITIK DAN SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Teori, Konsep, dan Isu Strategis. In *Pt Rajagrafindo Persada*.
- Putri, A. K. (2021). IMPLIKASI KEKUASAAN ASAFRI JAYA BAKRI DALAM PRAKTEK NEPOTISME PADA PEMERINTAHAN KOTA SUNGAI PENUH.
- Rijal, Muhammad Hasan Saeful dan Wawan Ichwanuddin. (2015). *Dinamika Politik Internal Partai Golkar pada Masa Kepemimpinan Jusuf Kalla 2004-2009*.
- Suharsimi, A. (2017). Politik Primordialisme dalam Pemilu di Indonesia. In *Hukum Perumahan*.
- Sunardi, S. (2020). OLIGARKI DI INDONESIA: RELASI KAPITAL YANG DOMINAN. *JURNAL POLITIK PROFETIK*. <https://doi.org/10.24252/profetik.v8i2a7>
- Widjaja, H. (2022). Evolusi Oligarki di Indonesia. *Research Gate*.
- Yusri, Y., & Mahuli, J. I. (2023). Dampak Negara dikendalikan Partai Politik dan Oligarki. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*.